

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penanaman modal yang sering disebut juga investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Adanya modal dalam sebuah perusahaan menjamin berlangsungnya proses produksi. Dengan kata lain, adanya modal dalam suatu perusahaan yang diperoleh dari penanaman modal memungkinkan perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi.

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. (**Sadono Sukirno :121**).

Investasi merupakan suatu alat untuk mempercepat pertumbuhan tingkat produksi di negara yang sedang berkembang, dengan demikian investasi berperan sebagai sarana untuk menciptakan kesempatan kerja. Investasi sebagai penanaman modal atau sering disebut juga dengan pembentukan modal merupakan suatu komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat suatu negara. Karena itu, dalam pembangunan ekonomi, peranan investasi sangatlah penting. Semakin

tinggi investasi, pendapatan nasional akan mengalami peningkatan karena peningkatan terhadap barang dan jasa bertambah.

Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dinamika investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, hal ini mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing. Begitupun dengan Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan investasi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi. **(Dumairy, 1996: 13)**

Alur investasi merupakan pembentukan modal yang mendukung peran swasta dalam perekonomian yang berasal dari dalam negeri. Harrod Domar menyatakan, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal seperti penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dengan adanya semakin banyak tabungan yang kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat terjadi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi secara riil, tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada setiap tabungan dan investasi tergantung dari tingkat produktivitas investasi tersebut **(Todaro M., 1993 : 65-66)**.

Setelah tergoncang krisis ekonomi pada tahun 1997/1998, perekonomian Indonesia berangsur-angsur mengalami pertumbuhan yang positif. Namun,

dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya, seperti Korea Selatan dan Thailand pertumbuhan rata-rata pertahun Indonesia masih relatif lambat. Bahkan apabila dibandingkan dengan pada masa Pemerintahan Orde Baru khususnya periode 1980-an sampai pertengahan 1990-an, pertumbuhan rata-rata pertahun masih jauh lebih rendah. Salah satu penyebabnya ialah belum insentifnya kegiatan investasi baik investasi asing (PMA) maupun investasi dalam negeri (PMDN).

Untuk membangun kembali perekonomiannya, pemerintah Indonesia harus mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Secara garis besar sumber pembiayaan pembangunan nasional dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni yang berasal dari dana masyarakat, swasta dan pemerintah. Dana yang berasal dari swasta ini dapat dibagi pula menjadi swasta dalam negeri dan swasta asing yang tercermin dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Sementara itu yang berasal dari pemerintah sendiri adalah berasal dari tabungan pemerintah serta yang berasal dari bantuan luar negeri. Tahun 1998 semua sumber diatas mencatat penurunan kecuali utang luar negeri yang semakin membengkak.

Sejak pertengahan 1997, Indonesia dan sebagian beberapa negara Asia Tenggara dan Timur mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh beberapa faktor baik yang bersifat eksternal maupun internal. Penarikan dana secara tiba-tiba dalam jumlah yang besar oleh para investor asing yang didorong oleh ketidakpercayaan prospek perekonomian regional dengan segera melemahkan mata uang rupiah secara drastis. Gelombang *capital outflow* tersebut kemudian

diikuti oleh aksi beli dollar penduduk domestik yang membuat nilai rupiah semakin terpuruk. Melemahnya nilai rupiah melalui berbagai transmisi menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan kepada sektor-sektor perekonomian dengan tingkat keseriusan yang berbeda-beda. Sementara itu fluktuasi nilai tukar tampaknya semakin sulit diprediksi, sehingga untuk menghentikan laju spekulasi dilakukan pengetatan moneter dengan konsekuensi suku bunga tinggi. Meningkatnya suku bunga umum tersebut secara paralel kemudian mendorong keatas bunga pinjaman atau biaya modal bagi perusahaan-perusahaan sektor riil. Kenaikan biaya modal tersebut dengan sendirinya mengganggu perencanaan investasi maupun produksi jangka panjang yang pada akhirnya berpengaruh pada menurunnya penawaran agregat. (**Noor Yudanto dan M. Setyawan Santoso**: 1998).

Seperti yang kita ketahui sebelum meletusnya krisis moneter, Indonesia berhasil mempertahankan *surplus balance of payments*-nya, rata-rata per tahun sebesar 2,574 milyar dollar AS selama periode 1990-1996. Pada tahun pertama krisis, Indonesia harus menghadapi *balance of payments deficit* sebesar 2,459 dollar AS. *Deficit* yang besar pada *balance of payments* ini disebabkan oleh *outflows* yang sangat besar dari modal swasta di Indonesia. Selama 1990-an, Indonesia menikmati *private capital inflows* yang besar dalam bentuk *private foreign direct investments* (FDI) / PMA . Selama periode 1990-1996, private FDI mengalir ke perekonomian Indonesia pada nilai rata-rata 2,715 milyar dollar AS per tahun. Sedangkan FDI / PMA yang ditarik keluar Indonesia adalah sebesar

356 juta dollar pada tahun 1998 dan 2,74 milyar dollar AS pada 1999. (**Awan Wibowo Laksono Poesoro**, 2005).

Dari tahun 1985 sampai dengan akhir tahun 1997, investasi asing langsung Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun, Indonesia terus memperlihatkan penurunan investasi (*disinvestment*) sejak krisis keuangan regional tahun 1998. Sekitar 1,172 milyar dollar AS investasi keluar dari Indonesia dalam enam bulan pertama tahun 2002, dibanding 3,3 milyar dollar AS sepanjang tahun 2001. (**Kompas**, 20 Februari 2003).

Disisi lain, tahun 1997 merupakan tahun kejayaan investasi dalam negeri, dengan nilai persetujuan PMDN mencapai angka tertinggi sejak negeri ini memulai pembangunannya. Pada tahun 1997 nilai PMDN yang disetujui mencapai Rp. 119.872,9 milyar dengan 717 proyek. Namun, penurunan drastis terjadi ditahun berikutnya yang terpankas hampir 50 persen menjadi Rp. 60.794,3 milyar dengan jumlah 320 proyek. Tahun 1999, turun menjadi Rp. 53.550 milyar dengan 228 proyek. Selanjutnya untuk tahun 2000, meningkat pesat mejadi Rp.92.327,7 milyar dengan jumlah 355 proyek. Kemudian pada tahun 2001, angka investasi kembali anjlok sekitar 30 persen menjadi Rp. 58.674 milyar dengan hanya 249 proyek. (**Zamroni**, 2008).

Perkembangan penanaman modal asing langsung (FDI) dan penanaman modal dalam negeri (DDI) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Perkembangan Penanaman Modal Asing Langsung (FDI) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (DDI) Periode 1985 – 2007

Tahun	Pertumbuhan (%)	PMA (FDI)		GAP (PMA-PMDN)	PMDN (DDI)		Pertumbuhan (%)
		Perubahan (Milyar Rp)	Nilai (Milyar Rp)		Nilai (Milyar Rp)	Perubahan (Milyar Rp)	
1985	-	-	1,014.45	-2,815.85	3,830.30	-	-
1986	33.66	341.42	1,355.87	-2,769.93	4,125.80	295.50	7.71
1987	132.57	1,797.48	3,153.36	-8,250.64	11,404.00	7,278.20	176.41
1988	137.80	4,345.47	7,498.82	-8,182.08	15,680.90	4,276.90	37.50
1989	15.62	1,171.17	8,669.99	-13,237.01	21,907.00	6,226.10	39.70
1990	104.91	9,095.79	17,765.78	-38,744.72	56,510.50	34,603.50	157.96
1991	-0.88	-156.89	17,608.89	-23,469.01	41,077.90	-15,432.60	-27.31
1992	20.66	3,637.29	21,246.18	-8,095.52	29,341.70	-11,736.20	-28.57
1993	-19.91	-4,229.20	17,016.98	-22,433.42	39,450.40	10,108.70	34.45
1994	243.46	41,430.29	58,447.27	5,158.17	53,289.10	13,838.70	35.08
1995	53.50	31,268.94	89,716.21	19,863.21	69,853.00	16,563.90	31.08
1996	-21.84	-19,594.39	70,121.82	-30,593.38	100,715.20	30,862.20	44.18
1997	40.29	28,249.21	98,371.03	-21,501.87	119,872.90	19,157.70	19.02
1998	38.30	37,674.16	136,045.20	75,295.90	60,749.30	-59,123.60	-49.32
1999	-37.11	-50,486.97	85,558.23	32,008.23	53,550.00	-7,199.30	-11.85
2000	51.85	44,361.23	129,919.46	36,022.36	93,897.10	40,347.10	75.34
2001	18.91	24,569.13	154,488.59	95,672.59	58,816.00	-35,081.10	-37.36
2002	463.88	716,633.95	871,122.54	845,892.04	25,230.50	-33,585.50	-57.10
2003	-86.62	-754,574.20	116,548.34	66,456.24	50,092.10	24,861.60	98.54
2004	-21.15	-24,646.93	91,901.41	57,761.01	34,140.40	-15,951.70	-31.84
2005	43.15	39,651.46	131,552.87	80,975.47	50,577.40	16,437.00	48.15
2006	9.12	11,994.10	143,546.97	-19,220.23	162,767.20	112,189.80	221.82
2007	139.37	200,067.67	343,614.64	154,738.34	188,876.30	26,109.10	16.04
Jumlah Rata-rata	61.80	15,572.74	218,023.74		58,511.09	8,411.18	36.35

Sumber : BKPM, BPS (*data diolah*)

Perkembangan nilai penanaman modal di Indonesia, antara penanaman modal asing (PMA) dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terlihat jauh berbeda. Tercatat adanya *gap* yang signifikan baik dilihat dari nilai realisasinya maupun pertumbuhannya. Penanaman modal asing (PMA) masih lebih baik dibandingkan dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Di periode 1985-2007, selisih (*gap*) nilai investasi yang terealisasi antara PMA dengan PMDN sebesar 1.270.529,92 milyar rupiah. Nilai penanaman modal asing (FDI) periode 1985-2007 sebesar 2.616.284,92 milyar rupiah, dengan rata-rata pertahun sebesar 218.023,74 milyar rupiah, rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 15.572,74 milyar rupiah atau sekitar 61,80 persen. Sedangkan nilai penanaman modal dalam negeri (DDI) periode tersebut sebesar 1.345.755 milyar rupiah, dengan rata-rata pertahun sebesar 58.511,09 milyar rupiah, rata-rata pertumbuhan per tahun 8.411,18 milyar rupiah atau sekitar 36,35 persen.

Di masa Orde Baru, nilai investasi PMDN meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, terutama semenjak tahun 1988, dimana puncaknya tahun 1997, yang mencapai nilai investasi Rp119 triliun dengan jumlah proyek 723 unit. Sedangkan selama masa reformasi hingga awal tahun 2005, nilai PMDN hanya mencapai Rp 33,4 triliun dengan 158 proyek. Kemudian untuk investasi PMA pada tahun 1997, nilainya mencapai US\$ 33,7 miliar dengan 778 proyek, dan selanjutnya turun drastis pada tahun 2004, sehingga nilainya hanya US\$ 9,6 miliar dengan 1.066 proyek. (**Marsuki Dea : 2006**).

Rulli Indrawan (2008) mengatakan kesenjangan PMA dengan PMDN terjadi karena masih lambannya proses persetujuan realisasi PMA dan PMDN. Oleh karena itu, untuk pemulihan pemulihan sektor riil saat ini adalah: (1) percepatan realisasi investasi setelah disetujui pemerintah; (2) meningkatkan kepercayaan investor dalam negeri (PMDN).

Hal ini terjadi karena investor lebih paham akan hambatan-hambatan dalam berinvestasi langsung, sehingga dana-dana dalam negeri lebih banyak

masuk ke pasar modal daripada investasi langsung. Berawal dari ketidakpercayaan para investor terhadap prospek perekonomian regional, membuat mereka enggan untuk menanamkan modalnya. Ditambah lagi merosotnya nilai rupiah secara drastis.

Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang pajak yang tidak kompetitif ikut menyumbang pada penurunan besar-besaran realisasi investasi dalam negeri yang mendorong para investor mencari status asing untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah di negara lain.

Perpajakan di Indonesia dirasakan kurang bersaing untuk menarik investasi. Pandangan ini umumnya diutarakan dalam tiga hal, yaitu: pelayanan pajak yang rendah, tarif pajak yang kurang bersaing dengan negara-negara di kawasan, serta kurang tersedianya insentif perpajakan untuk mendorong investasi.

Berdasarkan PPh pasal 17, tarif pajak penghasilan badan di Indonesia bersifat progresif, yaitu sebesar 10 persen, 15 persen, dan 30 persen. Sedangkan untuk tarif pajak penghasilan perorangan sebesar 5 persen, 10 persen, 15 persen, 25 persen dan 35 persen. Dibandingkan dengan Malaysia (28 persen, *single rate*) dan Thailand (30 persen, *single rate*), tarif pajak penghasilan badan di Indonesia saat ini relatif bersaing, namun agak lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam (25 persen) dan Singapura (22 persen).

Hal lain yang berkaitan dengan upaya mendorong peningkatan pertumbuhan investasi ialah dengan menerapkan tingkat suku bunga yang rendah. Rendahnya suku bunga mendorong investor untuk melakukan pinjaman pada lembaga perbankan yang mengakibatkan investasi akan naik. Jika suku bunga

tinggi tentu para investor tidak akan melakukan pinjaman pada lembaga perbankan karena suku bunga tinggi akan memperbesar beban biaya sehingga investasi tidak menarik. Tingkat bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang (*present value*) aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi. Tingkat bunga yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan-perusahaan.

Semakin baik keadaan ekonomi masa depan semakin besar tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Begitu pula perkembangan teknologi saat ini menjadi salah satu faktor penting bertambahnya investasi. Untuk menambah besarnya investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha pengusaha menggunakan penemuan-penemuan teknologi yang baru dalam proses produksi. Pada umumnya makin banyak perkembangan teknologi yang dibuat makin banyak pula kegiatan pembaruan yang dilakukan oleh para pengusaha. Untuk melaksanakan pembaruan-pembaruan tersebut para pengusaha membutuhkan modal-modal yang baru, maka makin banyak pembaruan yang dilakukan makin tinggi tingkat investasi yang akan tercapai.

Iklim investasi di Indonesia selanjutnya tidak lepas dari pengaruh stabilitas keamanan dan keuangan dalam negeri. Secara sederhana stabilitas keuangan atau sering juga dikatakan stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di dalam suatu laporan Bank Dunia mengenai iklim investasi (**World Bank**, 2005a) mengatakan,

stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi merupakan empat faktor terpenting.

Variabel ekonomi makro tersebut saling terkait melalui pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, serta pasar saham yang membentuk keseimbangan internal (*macro equilibrium*) dan keseimbangan eksternal (*balance of payment-BOP*). Keempat indikator ekonomi makro tersebut sangat mempengaruhi perkembangan investasi dalam negeri. Jika suatu guncangan menimbulkan fluktuasi yang besar pada variabel ekonomi makro, maka dapat dikatakan stabilitas ekonomi makro rentan terhadap guncangan tersebut. Sebaliknya, jika dampaknya menimbulkan fluktuasi yang kecil, maka dapat dikatakan stabilitas ekonomi makro stabil.

Sugiyanto (2003) mengungkapkan bahwa resiko *financial* dan ekonomi yang paling rawan adalah unsur inflasi. Tingkat inflasi mempunyai korelasi yang kuat terhadap stabilitas politik dan ekonomi. Karena itu, walaupun hanya tingkat inflasi yang mengkhawatirkan terhadap meningkatnya *country risk*, tetapi ia merupakan unsur vital yang harus mendapat perhatian dalam pengendaliannya.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI INDONESIA PERIODE 1990-2007"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga, tingkat pajak, kemajuan teknologi dan stabilitas keuangan terhadap perkembangan penanaman modal dalam negeri di Indonesia.

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga terhadap penanaman modal dalam negeri di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pajak terhadap penanaman modal dalam negeri di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh kemajuan teknologi terhadap penanaman modal dalam negeri di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh stabilitas keuangan terhadap penanaman modal dalam negeri di Indonsia?

1.3 Tujuan Penyusunan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat suku bunga terhadap PMDN di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak terhadap PMDN di Indonesia.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemajuan teknologi terhadap PMDN di Indonesia.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh stabilitas keuangan terhadap PMDN di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penyusunan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu ekonomi, khususnya perkembangan Ekonomi Makro mengenai pengaruh Tingkat Suku Bunga, Pajak, Kemajuan Teknologi dan Stabilitas Keuangan terhadap Investasi Dalam Negeri di Indonesia.
2. Untuk memperkuat atau membantah teori ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini khususnya teori ekonomi mengenai Investasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Sebagai informasi tambahan bagi para mahasiswa dan masyarakat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga, pajak, kemajuan teknologi dan stabilitas keuangan terhadap perkembangan penanaman modal dalam negeri.
2. Untuk memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu ekonomi khususnya khususnya di bidang investasi atau penanaman modal.
3. Memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian tindak lanjut mengenai penanaman modal terutama penanaman modal dalam negeri.